

DAMPAK KOMUNIKASI POLITIK DAN OPINI PUBLIK TERHADAP PERILAKU MASYARAKAT

Sitti Rabiatal Wahdaniyah H.

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu

Email : siti_rabiatal@iainpalu.ac.id

Abstract:

Openness of access to information in the digital era provides opportunities for political parties through tiered structures to build political communication, related to efforts to achieve democratic life and increase the degree of quality of public trust in political parties as a constitutional forum. Through communication of political issues and ideas, political parties seek to obtain a number of individual opinions accumulation openly and form public opinion through an activity in the form of a debate debate, or exchange of information between individuals who are in a group. The impact of political communication and public opinion on people's behavior cannot be generalized, because of the different effects it has on each individual due to differences in age, sex, religion, education, intelligence, occupation, socio-economic class, and so on. In addition, the public is a human being who can accept, reject, question, criticize so that with so many sources of information, the public can compare messages from one media with messages from other media, or with messages from public figures or authorities he trusts.

Keywords: Political Communication, Public Opinion, Community Behavior

Abstrak:

Keterbukaan akses informasi di era digital memberikan peluang bagi partai politik melalui struktur berjenjang untuk membangun komunikasi politik, berkaitan dengan usaha pencapaian kehidupan demikratis dan peningkatan derajat kualitas kepercayaan masyarakat kepada parpol sebagai salah satu wadah konstitusional. Melalui komunikasi isu dan gagasan politik, parpol berupaya memperoleh sejumlah akumulasi pendapat individual secara terbuka dan

membentuk opini publik melalui suatu kegiatan berupa debat pembicaraan, atau pertukaran informasi antara individu yang berada dalam satu kelompok. Dampak komunikasi politik dan opini publik terhadap perilaku masyarakat tidak dapat digeneralisir, karena dampak berbeda yang ditimbulkannya pada setiap individu karena perbedaan latar belakang usia, jenis kelamin, agama, pendidikan, kecerdasan, pekerjaan, kelas sosial-ekonomi, dan sebagainya. Selain itu, publik adalah manusia yang bisa menerima, menolak, mempertanyakan, mengkritisi sehingga dengan begitu banyaknya sumber informasi, publik bisa membandingkan pesan dari satu media dengan pesan dari media yang lain, atau dengan pesan dari public figure atau otoritas yang ia percayai.

Kata kunci: Era digital, Komunikasi Politik, Opini Publik, Perilaku Masyarakat

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi dan keterbukaan akses informasi di era digital menciptakan dinamika bagi komunikasi politik yang digunakan oleh para aktor politik. Proses komunikasi politik semakin intensif dan meluas, mendorong lembaga politik, parpol, dan politisi mengambil peran strategis dan taktis dalam membangun partisipasi politik masyarakat. Program dan kebijakan harus disebarluaskan agar rakyat mengetahui dan ikut mendiskusikannya dalam berbagai bentuk forum diskusi publik. Keberhasilan pembangunan politik di Indonesia ditunjang oleh komunikasi politik, dimana asumsi umum memperlihatkan bahwa dengan adanya partisipasi warga negara yang aktif dalam urusan kewarganegaraannya, hal ini menunjukkan bahwa demokrasi dapat dipelihara dan dipertahankan.

Komunikasi politik menjadi kajian yang menarik perhatian, bukan hanya para sarjana komunikasi dan sarjana politik, tetapi juga bagi politisi yang aktif di berbagai partai politik. Plano¹ (dalam Mulyana, 2007 : 29) melihat bahwa "komunikasi politik merupakan proses penyebaran, makna atau pesan yang bersangkutan dengan fungsi suatu sistem politik".² Ini

¹ Jack C. Plano adalah ahli kamus politik yang paling terkenal di Amerika dengan karya bukunya *The American Political Dictionary*, lahir di Merrill, Wisconsin, Amerika, 25 November 1921 dan meninggal dunia di usia 81 tahun, 21 November 2002, Plano adalah seorang profesor emeritus ilmu politik di Universitas Western Michigan.

² Tosepu, Yusrin Ahmad. 2017. Media Baru dalam Komunikasi Politik "*Komunikasi Poliyik di Dunia Virtual*" (Makassar: Kavita Media) hlm 59.

berarti kemampuan membangun pencitraan politik melalui komunikasi politik guna mengarahkan opini publik adalah tantangan bagi para aktor politik dan partai politik. Menurut Clyde³, opini publik adalah penilaian sosial mengenai suatu masalah yang penting dan berarti, berdasarkan proses pertukaran-pertukaran yang sadar dan rasional oleh khalayaknya (Sumarno, 1990:19). Opini personal berupa kegiatan verbal dan non-verbal yang menyajikan citra dan interpretasi individual dalam bentuk isu yang diperdebatkan, dimana dapat dinyatakan apakah opini tersebut berlangsung secara aktif atau pasif.

Publik dapat diartikan sebagai khalayak media massa (audience). Publik juga dapat dipahami sebagai sekelompok orang yang menaruh perhatian terhadap masalah yang dilontarkan melalui mas media atau media massa, dan ikut serta dalam proses diskusi yang intensif untuk mencari cara memecahkan masalah yang dihadapi untuk kepentingan umum atau orang banyak. Dalam hal ini publik tidak sama dengan massa atau *crauwd* (kerumunan). Bahkan publik merupakan bagian dari masa yang memiliki perhatian dan aktif berproses memecahkan masalah. Publik juga diartikan sebagai individu-individu di dalam kelompok yang memiliki atau diharapkan memiliki opini atau pendapat. Justru itu individu-individu dalam publik memiliki pengetahuan dan keahlian tentang masalah yang akan dipecahkan. Opini publik memiliki kemampuan besar untuk mempengaruhi perilaku masyarakat, misalnya mampu meninggikan atau mengecilkan citra, meningkatkan dan menurunkan kepercayaan publik, dan mempengaruhi eksistensi sebuah organisasi atau aktor politik.

Opini publik akan selalu beriringan dengan komunikasi politik, dimana peran opini publik sangat substansial dalam proses komunikasi politik karena proses komunikasi politik tidak akan terjadi tanpa membentuk opini publik. Kebebasan mengeluarkan pendapat atau opini dari manusia sebenarnya merupakan salah satu hak asasi yang pokok yang dimiliki manusia, yaitu hak kebebasan atau kemerdekaan di samping hak asasi lainnya, yaitu hak hidup, hak milik, dan hak kebahagiaan. Hak kebebasan atau hak kemerdekaan ini di banyak negara dicantumkan dalam UUD-nya dengan nama yang sama dan tambahan hak kebebasan lainnya. Di Indonesia hak kebebasan atau kemerdekaan itu bukan hanya dalam mengeluarkan pendapat, tetapi juga kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan kemerdekaan lainnya yang ditetapkan

³ Clyde Lyndon King lahir Pennsylvania tahun 1979, selama bertahun-tahun menjabat sebagai Kepala Departemen Ilmu Politik di Wharton School of University of Pennsylvania. Meninggal di rumahnya di Westtown, Pennsylvania, pada 21 Juni 1937. Dr. King, juga seorang ekonom, adalah salah satu dari orang-orang pertama yang dikenal dalam politik sebagai "pemikir otak".

dalam Undang-Undang (UU). Tulisan ini akan membahas hubungan dan struktur berjenjang antara komunikasi politik dan opini publik dalam mempengaruhi perilaku masyarakat.

B. Pembahasan

1. Komunikasi Politik di Era Digital

Komunikasi politik adalah bentuk dari jalannya proses interaksi antar komponen dalam negara yaitu pemerintah dengan warganya, warga dengan sesama warga dalam bentuk kolektif maupun individual serta lembaga-lembaga politik seperti partai dan sebagainya. Menurut Gabriel Almond⁴ (1960), Semua fungsi yang dilakukan dalam sistem politik, sosialisasi dan rekrutmen politik, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, pembuatan aturan, penerapan aturan, dan adjudikasi aturan, dilakukan dengan sarana komunikasi. Kemudian menurut Effendy Gazali (2005), substansi komunikasi politik ada dua yaitu pencitraan dan fungsi-fungsi informasi.⁵ Pencitraan mencakup *positioning* dan memori, sedangkan fungsi-fungsi informasi berguna mengurangi ketidakpastian demi kepentingan publik dan berupaya memprediksi, merencanakan, serta menjelaskan komunikasi strategis yang dilakukan secara terukur.

Satu set tema teoretis yang bertahan lama dan stabil telah mendominasi studi komunikasi politik, daripada teori tunggal mana pun. Namun demikian, keragaman teoritis komunikasi politik menampilkan tema umum tertentu, seperti kepedulian abadi dengan efek komunikasi. Meskipun bidang komunikasi politik dimulai dengan mempelajari efek media cetak dan radio pada pilihan pemungutan suara individu, bidang tersebut telah diperluas untuk mencakup aspek-aspek tambahan komunikasi dan perilaku politik. Dalam pemilihan di era tahun 2000, hampir setiap kandidat politik yang mencalonkan diri untuk jabatan di setiap tingkat (presiden, lembaga legislatif, kabupaten, kota, dan lokal) memiliki situs Web aktif. Fakta ini menunjukkan pentingnya teknologi komunikasi terkait Internet saat ini dalam komunikasi politik dan menunjukkan bagaimana bidang khusus ini telah berevolusi sejak awal mula di abad yang lalu di tangan Walter Lippman, Harold Lasswell, Paul F. Lazarsfeld, dan leluhur lainnya

⁴ Gabriel Almond adalah seorang Ahli Sains Politik yang berkontribusi pada pekerjaan teoretis tentang perkembangan politik. Dia lahir di 12 Januari 1911 di Rock Island, Illinois, Amerika Serikat dan meninggal di Pacific Grove, California, Amerika Serikat pada 25 Desember 2002. Semasa hidupnya dia bekerja di beberapa institusi terkemuka meliputi Kampus Brooklyn, Kantor Informasi Perang Amerika Serikat, Pusat Survei Strategi Pengeboman Amerika Serikat, Universitas Yale, Universitas Princeton dan Universitas Stanford.

⁵ Sumber: Hiplunudin, Agus. 2017. *Politik Era Digital* (Yogyakarta: Calpulis), hlm. 49.

serta pendiri studi komunikasi.⁶ Meskipun pertumbuhan televisi pada 1950-an dan Internet pada 1990-an, yang mengubah saluran komunikasi yang membawa pesan-pesan politik kepada publik AS khususnya, proses komunikasi manusia tertentu yang terlibat dalam mengubah perilaku politik tetap sama.

Internet mampu melampaui masa dan jarak. Sejarah internet bermula pada saat perang dingin pada tahun 1962, dimana adanya keinginan untuk memudahkan komunikasi informasi militer oleh *Air force* dan oleh saintis yang mereka miliki membangun teknologi pendukungnya. Berdasarkan data Socialbakers (2012) Indonesia menduduki nomor empat sebagai negara pengguna Facebook terbesar di dunia dengan bilangan pengguna 49.948.800 dan Facebook menjadi media sosial nomor satu di Indonesia.⁷ Internet atau media sosial menjadi sarana komunikasi yang efektif, dengan jumlah pengguna yang semakin bertambah setiap hari termasuk dari kalangan partai politik untuk berusaha membangun citra diri yang lebih intelek. Sebut saja pemilu presiden Indonesia tahun 2019, partai politik mempromosikan kandidatnya dan bahkan menyerang lawan kandidat menggunakan pesan Whatsapp yang merupakan instrumen potensial karena dapat diteruskan kepada masyarakat lain yang nonsubscriber.

2. Marketing Politik dan Opini Publik

Marketing politik dalam konteks perpolitikan merupakan sebuah metode dan pendekatan pemasaran atau pengiklanan politik melalui internet, dimana para politisi akan memperoleh keuntungan dalam hal memasarkan citra dirinya layaknya keuntungan pemasaran bisnis dalam dunia bisnis. Menurut Baines⁸ (2012), Fokus pemasaran politik adalah nilai-nilai pasar, ideologi, dan kandidat partai politik berbeda dengan pemasaran produk dan jasa konvensional dalam organisasi komersial. Pendapat ini menganggap bahwa manajer pemasaran di sektor komersial dan ahli strategi kampanye politik secara fundamental dihadapkan pada masalah yang sama. Namun saat ini kita perlu menyadari bahwa pemasaran dalam politik adalah penawaran politik partai, kebijakan, pemimpin, dan isu-isu yang dapat berhubungan dengan pemilih yang didasarkan pada posisi strategis partai yang dipilih dan apa dianggap

⁶ Sumber: Kaid, Lee Lynda. 2004. *Handbook of Political Communication Research*. (University of Florida: LEA), hlm. 3.

⁷ Sumber: Hiplunudin, Agus. 2017. *Politik Era Digital* (Yogyakarta: Calpulis), hlm. 21.

⁸ Paul Baines (lahir 9 Mei 1973) adalah akademisi pemasaran Inggris, yang berspesialisasi dalam topik pemasaran untuk partai politik dan kandidat. Dia adalah profesor di bidang Pemasaran Politik di Universitas Cranfield. Dia adalah mantan Direktur Pengembangan Bisnis di Middlesex University Business School dan mantan Direktur untuk Baines Associates Limited, sejak 2008. Pada 2019 ia bergabung dengan University of Leicester sebagai Profesor Pemasaran Politik dan Dekan Asosiasi.

sebagai orientasi publik dan pemilih. Pengaplikasian konsep pemasaran inti ini berlaku untuk memenangkan pemilihan dan untuk pembangunan bangsa, di mana komunikasi dan hubungan antara partai-partai politik dan pemangku kepentingan lainnya memungkinkan dialog, umpan balik, dan partisipasi dalam sistem politik.

Medan politik di sebagian besar negara di dunia ditandai oleh persaingan yang ketat. Sebagian, ini dapat dikaitkan dengan meningkatnya permintaan dari publik, kemudahan akses ke informasi oleh pemilih, perilaku pemilih yang berkembang, penggunaan teknologi dalam politik dan pendekatan metodis dan ilmiah oleh organisasi yang bersaing. Penerapan teknik pemasaran strategis dalam politik dapat menawarkan keunggulan kompetitif dan kerangka kerja terstruktur untuk keberhasilan dalam kampanye dan proses politik. Emmer⁹, dkk. (2012) menyarankan bahwa desain strategi komunikasi yang tepat tidak hanya akan membantu kandidat atau partai politik untuk memenangkan pemilihan, tetapi juga dapat menyediakan platform bagi semua pemangku kepentingan untuk terlibat dan berpartisipasi dalam proses politik. Menurut Howard¹⁰ (2006) bahwa lanskap komunikasi politik mengalami perubahan paradigma pada pergantian abad dengan pertumbuhan eksponensial dari internet dan teknologi komunikasi. Antara 1999 dan 2007, penggunaan situs web dan email untuk melibatkan pemilih sangat menonjol dan beberapa kampanye khususnya di AS mulai menargetkan bagian pemilih yang berbeda dengan informasi yang hanya relevan bagi mereka saja. Namun perkembangan luar biasa dalam ruang teknologi komunikasi digital dari pertengahan periode yang sama hingga saat ini telah membuka peluang baru bagi sistem politik dan pemilih. Kemungkinan tingkat partisipasi pemilih telah berubah dari konsumen informasi menjadi peserta aktif dalam proses pemilihan.

Munculnya dan adopsi media sosial sebagai sarana komunikasi, mengembangkan dan memelihara hubungan sosial telah mengantarkan pada paradigma baru dan kemungkinan tak terbatas dalam sistem politik. Dapat dikatakan bahwa media sosial mungkin secara bertahap mengubah konsep dan tingkat partisipasi politik. Penelitian sebelumnya menggambarkan partisipasi politik sebagai upaya yang dilakukan oleh warga untuk mencoba dan mempengaruhi

⁹ Thomas Earl Emmer Jr. (lahir 3 Maret 1961) adalah seorang pengacara dan politisi Amerika yang telah menjadi Perwakilan AS untuk distrik kongres ke-6 Minnesota sejak Januari 2015. Emmer menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Minnesota dari 2005 hingga 2011 dan merupakan calon Partai Republik untuk gubernur dalam pemilihan 2010. Dalam pemilihan umum November 2014, ia memenangkan kursi Distrik Kongres ke-6 yang dikosongkan oleh Michele Bachmann.

¹⁰ Howard L. Rosenthal (lahir 1939) adalah seorang profesor politik di New York University. Dia juga mengajar di Carnegie-Mellon University dan Princeton University, di mana dia adalah profesor ilmu sosial Roger Williams Straus.

proses politik (Himmelboim, 2012). Dapat disimpulkan dari deskripsi bahwa partisipasi pemilih dalam proses politik dapat berasal dari sudut pandang pengaruh yang jauh lebih rendah karena upaya mereka tidak terorganisir dan politisi memiliki suara yang lebih keras yang memproyeksikan gambar pilihan mereka. Teknologi digital baru, termasuk media sosial, menciptakan paradigma baru dalam partisipasi politik. Studi terbaru menunjukkan bahwa melalui media baru, komunikasi bottom-up telah menemukan jalannya ke lingkaran politik di banyak negara di mana pemilih lebih diberdayakan untuk mengekspresikan dan menegakkan pandangan politik mereka. Juga telah diamati bahwa media sosial dapat digunakan dalam organisasi untuk upaya pemilih mendapatkan momentum yang cukup yang dapat mempengaruhi sistem dan struktur politik. Selain itu, menarik untuk dicatat bahwa bahkan kelompok minoritas dan yang sebelumnya dikucilkan sekarang dapat memiliki pengaruh yang berarti dalam politik (Howard dan Parks¹¹, 2012). Hal ini dapat dilihat dalam peningkatan partisipasi orang dewasa muda dalam proses politik, yang secara langsung disebabkan oleh penggunaan media sosial.

Opini Publik adalah kumpulan pendapat individu terhadap masalah tertentu yang mempengaruhi suatu kelompok orang-orang / masyarakat (Sumirat, 2002). Sejak jaman dahulu, sejumlah besar sinonim untuk opini publik juga telah digunakan, termasuk istilah sederhana seperti *opinione* dan *pendapat*. Contoh awal penggunaan seperti itu ditemukan, misalnya, dalam tulisan-tulisan Niccol`o Machiavelli, William Shakespeare, William Temple, John Locke, dan David Hume. Penggunaan pertama yang dikenal dari frasa "iklim pendapat" dalam bahasa Inggris ditemukan oleh Robert K. Merton¹² dalam karya Joseph Glanvill¹³ (1661). Fakta bahwa mengonseptualisasikan opini publik sebagai domain dari elit intelektual merupakan kesalahpahaman yang besar tentang sifat manusia dan sosiopsikologis mekanisme yang berfungsi dalam demokrasi. Karakteristik opini publik yang paling penting, yang telah mendorong para ilmuwan sosial untuk menyelidikinya lagi dan lagi, adalah kekuatan luar biasa yang dipegang atas pemerintah dan anggota masyarakat secara individu. Konsep opini publik

¹¹ William Robert Parks (13 Oktober 1915 - 13 Juli 2003) adalah presiden ke-11 dari Iowa State University, dan ilmuwan sosial pertama yang menjadi presiden universitas.

¹² Robert K Merton adalah seorang Sosiolog yang mengembangkan konsep keseimbangan bersih Dikenal atas Kemajuan di bidang sosiologi; Ramalan swawujud. Robert K Merton lahir pada tanggal 4 Juli 1910 di pemukiman kumuh di Philadelphia, dan meninggal pada 23 Februari 2003 (umur 92) di Kota New York, New York, Amerika Serikat,

¹³ Joseph Glanvill adalah seorang penulis, filsuf dan juga pendeta di Inggris. Dia lahir pada 1636 dan meninggal dunia pada 1680. Dia tidak disebut sebagai ilmuwan, sekalipun dia memiliki banyak kemampuan pada bidang apologi dan virtuosi. Dia juga dikenal sebagai pengemuka filsafat natural pada abad ke tujuh belas.

sebagai bentuk penilaian rasional sama sekali tidak mampu menjelaskan bagaimana opini publik mampu memberi ketakutan dihati para penguasa yang perkasa dan memicu pemberontakan rakyat. Kekuatan yang diberikan opini publik dapat dijelaskan hanya dengan kembali ke pandangan tradisional tentang opini publik seperti yang telah dipahami selama berabad-abad, yaitu, opini publik dalam pengertian kontrol sosial. Dengan kata lain, kita harus mengasumsikan bahwa opini publik memperoleh kekuatannya dari sifat sosial manusia, yang telah berkembang selama evolusi, dari cara-cara perilaku yang mendorong kehidupan sosial dan ini tidak didasarkan pada pemikiran rasional atau logis tetapi pada emosi, reaksi refleksif, dan alam bawah sadar.

Gerakan yang didukung oleh media sosial telah menggulingkan pemerintah dan membantu orang lain untuk memenangkan pemilihan, memberikannya peran dalam politik generasi baru, yang tidak dapat diabaikan. Perubahan politik yang belum pernah terjadi sebelumnya di beberapa negara menunjukkan kemampuan teknologi digital untuk memfasilitasi diskusi dan mendorong tindakan kolektif. Menurut Howard dan Parks (2012), aspek lain dari paradigma baru dalam politik ini adalah hubungan langsung yang ada antara diskusi politik dan partisipasi politik dan hubungan antara difusi teknologi, media digital dan perubahan politik. Buktinya adalah keterlibatan generasi baru orang-orang yang terhubung secara digital dalam partisipasi politik. Media sosial efektif karena menciptakan ilusi hubungan pribadi yang membuatnya tampak 'apolitis'.

3. Stereotip, Minat, dan Keinginan Publik

Sistem stereotip mungkin menjadi inti dari tradisi pribadi kita, pertahanan posisi kita dalam masyarakat. Mereka adalah gambaran dunia yang teratur, kurang lebih konsisten, sesuai kebiasaan kita, selera kita, kapasitas kita, kenyamanan kita dan harapan kita telah menyesuaikan diri. Mereka mungkin bukan gambaran dunia yang lengkap, tetapi mereka adalah gambaran dunia yang mungkin kita adaptasi. Di dunia itu orang dan benda memiliki tempat terkenal, dan melakukan hal-hal tertentu yang diharapkan. Karakter stereotip tergantung pada pola-pola inklusif yang merupakan filosofi hidup masyarakat. Jika dalam filosofi itu masyarakat mengasumsikan bahwa dunia dikodifikasikan menurut kode yang mereka miliki, mereka cenderung membuat pernyataan tentang apa yang sedang terjadi menggambarkan dunia yang dijalankan oleh kode mereka secara kaku. Tetapi jika filosofi mereka memberi tahu mereka bahwa setiap manusia hanyalah sebagian kecil dari dunia, bahwa kecerdasannya hanya menangkap fase dan aspek terbaik dalam jaring ide yang kasar, kita cenderung tahu bahwa itu

adalah hanya stereotip yang fleksibel, dan ada peluang memodifikasinya dengan senang hati. Masyarakat juga cenderung untuk semakin menyadari ketika ide-ide kita dimulai, di mana mereka mulai, bagaimana mereka datang kepada kita, mengapa kita menerimanya, dan menanamkan satu prasangka dalam pikiran ini. Misalnya pada kebijakan publik yang memiliki efek luas, masyarakat cenderung hanya melihat fase dan aspek tertentu saja, yaitu para politisi yang merancang perjanjian, membuat undang-undang, dan mengeluarkan perintah, seperti halnya masyarakat yang memiliki perjanjian yang dibuat untuk mereka, hukum yang diumumkan kepada mereka, perintah yang diberikan kepada mereka. Masyarakat harus disatukan dari apa yang dilaporkan orang lain dan apa yang bisa mereka bayangkan. Jika kita tidak dapat sepenuhnya memahami tindakan orang lain, sampai kita tahu apa yang mereka pikir mereka tahu, maka untuk melakukan keadilan kita harus menilai tidak hanya informasi yang telah mereka miliki, tetapi pikiran yang melaluinya dimana mereka telah menyaringnya.¹⁴

Sikap individual dan minat keduanya dikandung entah bagaimana, dan bahwa sebagian besar mereka dikandung secara konvensional. Doktrin kepentingan diri secara umum menghilangkan fungsi kognitif. Begitu mendesaknya pada kenyataan bahwa manusia akhirnya merujuk semua hal kepada diri mereka sendiri, sehingga tidak berhenti untuk memperhatikan bahwa ide-ide tentang semua hal dan diri mereka sendiri tidak naluriah. Kualitas manusia itu sendiri tidak jelas dan berfluktuasi. Mereka diingat oleh tanda fisik. Dan karena itu, kualitas manusia yang kita anggap berasal dari nama-nama kesan kita, itu sendiri cenderung divisualisasikan dalam metafora fisik. Ketika urusan politik dipopulerkan dalam pidato, berita utama, drama, gambar bergerak, kartun, novel, patung atau lukisan, transformasi mereka menjadi minat manusia membutuhkan abstraksi pertama dari aslinya, dan kemudian animasi dari apa yang telah diabstraksikan. Abstraksi, yang dikenakan pada pengetahuan kita tentang realitas dengan semua keterbatasan akses kita dan prasangka kita, dikompensasi.

Keinginan publik selalu menyerukan penjelasan. Mereka yang sangat terkesan dengan citra individu lain misalnya kandidat calon pemimpin, telah menyambut generalisasi tentang apa yang disebut oleh senyawa kebodohan, kelemahan, prasangka, perasaan salah, perasaan benar, keras kepala, dan paragraf surat kabar atau media sosial yang disebut opini publik. Yang lain mencoba memohon jiwa kolektif, pikiran kebangsaan, semangat zaman yang memaksakan ketertiban berdasarkan pendapat acak, karena emosi dan gagasan dalam anggota suatu kelompok tidak mengungkapkan apa pun yang begitu sederhana dan sangat kompleks sebagai

¹⁴ Sumber: Curtis, Michael. 1998. *Public Opinion* Walter Lippman With New Introduction by Michael Curtis (USA and UK: Transaction Publisher). hlm. 79.

formula yang akan diterima oleh individu yang sama sebagai pernyataan yang benar dari opini publik mereka. Menurut John Dewey¹⁵ (1916) bahwa orang-orang hidup dalam komunitas berdasarkan hal-hal yang mereka miliki bersama; dan komunikasi adalah cara mereka memiliki kesamaan. Stimulus yang awalnya menjadi pemicu serangkaian gambar dalam pikiran yang timbul oleh kata-kata yang dicetak atau diucapkan oleh aktor dan partai politik berfluktuasi, perlahan-lahan proses ini menentukan apa yang masyarakat rasakan tanpa sepenuhnya yakin mengapa mereka merasakannya. Tetapi emosi terus berlanjut dan dalam pemikiran yang keras mereka mencoba membandingkan dua situasi yang rumit, apakah akan menerima atau menolak. Masyarakat jatuh ke dalam verbalisme, dan mulai berbicara tentang pro kontra dari objek yang diperbincangkan dan berpengaruh terhadap perubahan dalam politik kasual.

4. Pengorganisasian Kecerdasan dan Dampak kepada Perilaku Masyarakat

Praktik demokrasi telah mendahului teorinya. Karena teorinya berpendapat bahwa pemilih dewasa yang diambil bersama-sama membuat keputusan berdasarkan kehendak yang ada di dalamnya. Tetapi seperti halnya tumbuh hierarki pemerintahan yang tidak terlihat dalam teori, ada sejumlah besar adaptasi konstruktif, juga tidak diperhitungkan dalam citra demokrasi, yaitu era digital yang memungkinkan pengorganisasian kecerdasan lebih efisien, misalnya memungkinkan komunikasi politik dan opini publik mampu menyentuh kalangan anak muda. Menurut Edelman¹⁶ (1995) politik adalah sebuah drama yang terjadi di dunia yang diasumsikan dan dilaporkan yang membangkitkan ancaman dan harapan, sebuah dunia yang orang-orang tidak secara langsung amati atau sentuh. Teori normatif demokrasi perwakilan modern mengasumsikan lingkungan informasi di mana warga negara dapat belajar tentang masalah mendesak saat itu, mengikuti tindakan pejabat terpilih dan pejabat pemerintah, dan mengomunikasikan pandangan mereka kepada para pejabat ini. Teori demokrasi langsung mengasumsikan lingkungan komunikasi yang lebih kaya yang membantu memberikan motivasi,

¹⁵ John Dewey adalah seorang filsuf dari Amerika Serikat, yang termasuk Mazhab Pragmatisme. Selain sebagai filsuf, Dewey juga dikenal sebagai kritikus sosial dan pemikir dalam bidang pendidikan. Dewey dilahirkan di Burlington pada tahun 1859. Setelah menyelesaikan studinya di Baltimore, ia menjadi guru besar dalam bidang filsafat dan kemudian dalam bidang pendidikan pada beberapa universitas. Sepanjang kariernya, Dewey menghasilkan 40 buku dan lebih dari 700-an artikel. Dewey meninggal dunia pada tahun 1952 di New York, Amerika.

¹⁶ Murray Edelman adalah ahli komunikasi lahir 5 November 1919, Nanticoke, Pennsylvania, Amerik, dan meninggal 26 Januari 2001, Madison, Wisconsin, Amerika. Dia banyak menulis mengenai bahasa dan simbol politik dalam komunikasi. Gagasan Edelman mengenai framing disarikan dari tulisannya, "Contestable Categories and Public Opinion". Menurut Edelman, apa yang kita ketahui tentang realitas atau tentang dunia tergantung pada bagaimana kita membingkai dan merekonstruksi realitas.

kemampuan, dan peluang warga negara untuk berpartisipasi dengan cara yang lebih berkelanjutan, menuntut, dan beragam. Pada gilirannya, keterbatasan dalam lingkungan komunikasi ditunjukkan sebagai alasan utama mengapa praktik demokrasi tidak memenuhi harapan normatif, sedangkan peningkatan pada lingkungan komunikasi dilakukan sebagai cara untuk memperbaiki keadaan keterbatasan tersebut.

Apa yang dimaksud dengan warga negara yang terlibat? Meskipun tidak ada jawaban sederhana untuk pertanyaan ini, sebagian besar teori dan penelitian akan mencakup (1) kepatuhan terhadap norma dan nilai-nilai demokrasi; (2) memiliki seperangkat sikap dan kepercayaan yang beralasan secara empiris tentang hakikat dunia politik dan sosial; (3) memegang opini yang stabil, konsisten, dan terinformasi tentang masalah-masalah publik utama saat itu; dan (4) terlibat dalam perilaku yang dirancang untuk mempengaruhi, secara langsung atau tidak langsung, kualitas kehidupan publik untuk diri sendiri dan orang lain. Yang mendasari semua elemen ini adalah asumsi bahwa warga negara juga memiliki keterampilan dan sumber daya yang diperlukan untuk mengembangkan nilai-nilai, sikap, dan pendapat yang diinformasikan, menghubungkan mereka bersama, dan menerjemahkannya ke dalam tindakan yang efektif. Norma dan nilai-nilai demokrasi termasuk kemanjuran internal dan eksternal, kepercayaan politik dan sosial, kepentingan politik, tugas sipil, dan toleransi politik. Orientasi ini memberikan dasar emosional dan kognitif yang diperlukan untuk keterlibatan dalam kehidupan publik yang menyeimbangkan konflik dengan konsensus, kepentingan pribadi dengan kepentingan kolektif, dan skeptisisme yang sehat dengan keyakinan pada institusi dan proses dari pemerintahan yang demokratis.

Sikap dan keyakinan merujuk pada pandangan umum seseorang tentang dunia sosial dan politik tempat mereka hidup. Sikap dan keyakinan dibedakan dari pendapat karena mereka lebih cenderung terbentuk pada awal kehidupan seseorang, kurang spesifik terhadap masalah, dan kurang menerima perubahan jangka pendek. Sikap dan kepercayaan yang relevan secara politis dapat mencakup orientasi ideologis, keberpihakan, pandangan tentang kepentingan relatif dari kesetaraan versus kebebasan, perasaan apakah dunia adalah tempat yang aman, komitmen relatif terhadap hak-hak individu versus kolektif, dan gagasan umum tentang ras dan keragaman. Tidak seperti norma dan nilai-nilai demokrasi, tidak ada anggapan bahwa sikap atau kepercayaan tertentu lebih atau kurang bermanfaat bagi masyarakat demokratis. Namun ini tidak berarti bahwa mereka sama beralasan atau masuk akal. Sebaliknya, harapannya adalah bahwa sikap dan keyakinan walaupun mengandung komponen afektif atau emosional, juga didasarkan pada penilaian yang akurat tentang dunia empiris. Misalnya, jika seseorang memiliki

komitmen yang mendalam pada partai politik tertentu, orang akan berharap bahwa komitmen ini didasarkan pada beberapa pemahaman tentang apa yang diperjuangkan partai ini dan bagaimana hubungannya dengan nilai-nilai lain, kepercayaan, dan pendapatnya.

Penyelenggaraan opini, terutama opini yang stabil, konsisten, dan informasi terstruktur merupakan elemen penting dari proses demokrasi dan kewarganegaraan demokratis. Namun, yang lebih penting atau lebih penting adalah "ekspresi perilaku" dari pendapat-pendapat ini. Pendapat dapat diungkapkan secara langsung atau tidak langsung. Ekspresi langsung termasuk berbicara secara informal dengan orang lain, berpartisipasi dalam musyawarah dan pertemuan yang lebih formal, menandatangani petisi, menulis surat kepada editor, dan menghubungi pejabat publik. Ungkapan tidak langsung termasuk bentuk-bentuk lain dari aktivitas politik atau sipil, dari pemungutan suara, untuk keanggotaan dalam suatu organisasi, secara sukarela dalam komunitas. Seringkali dibuat perbedaan antara perilaku politik dan sipil. Perilaku politik secara umum didefinisikan sebagai kegiatan yang dimaksudkan secara langsung atau tidak langsung untuk mempengaruhi pemilihan wakil terpilih dan atau pengembangan, implementasi, atau penegakan kebijakan publik melalui pemerintah (misalnya, memilih, bekerja untuk partai politik, atau menghubungi pejabat terpilih). Perilaku masyarakat mengacu pada partisipasi sebagai individu atau anggota kelompok yang dimaksudkan untuk mengatasi masalah publik secara langsung melalui metode yang berada di luar pemilihan dan pemerintah (misalnya, sukarela untuk bekerja di dapur umum atau tempat penampungan tunawisma atau membentuk sukarelawan lingkungan, dan asosiasi untuk mengatasi masalah kejahatan).

Hubungan kausal antara penggunaan media urusan publik dan partisipasi politik tidak jelas, meskipun asumsi umum adalah bahwa itu memiliki hubungan dua arah yaitu warga negara yang lebih partisipatif lebih cenderung mengikuti urusan publik di media, tetapi paparan media urusan publik juga meningkatkan partisipasi. Dampak positif dari penggunaan media terhadap partisipasi sebagian besar tidak langsung, terjadi melalui pengaruhnya terhadap motivasi (misalnya, minat politik) dan kemampuan (yang paling terpusat, pengetahuan politik). Namun, media juga dapat memiliki dampak yang lebih langsung pada partisipasi melalui penyediaan "memobilisasi informasi" seperti panggilan spesifik untuk bertindak dan identifikasi peluang spesifik untuk bertindak (Lemert, 1981, 1992; Merritt, 1998; Sirianni & Friedland, 2001).¹⁷

¹⁷ Sumber: Kaid, Lee Lynda. 2004. Handbook of Political Communication Research. (University of Florida: LEA), hlm. 418.

Bentuk media lain juga telah terbukti berhubungan positif dengan partisipasi sipil dan politik. Sebagai contoh, Bennett¹⁸ (1998) menemukan bahwa pendengar untuk berbicara radio secara signifikan lebih mungkin untuk berpartisipasi dalam berbagai cara. Namun, meskipun media urusan publik tampaknya terkait positif (dengan berbagai tingkat) dengan partisipasi, media hiburan adalah cerita lain. Putnam¹⁹ (2000) menemukan bahwa meskipun menonton berita televisi berkorelasi dengan peningkatan partisipasi sipil dan politik, ada hubungan negatif yang konsisten antara jumlah waktu yang dihabiskan untuk menonton televisi hiburan dan sejumlah kegiatan termasuk menghadiri pertemuan publik, menulis surat kepada anggota kongres, menghadiri pertemuan atau melayani sebagai pejabat atau anggota komite organisasi lokal, atau menjadi sukarelawan di masyarakat. Dan Brehm dan Rahn (1997) menyimpulkan bahwa menonton televisi satu jam lebih sedikit setiap hari akan memiliki efek yang setara dan positif pada keterlibatan sipil sebagai 5 atau 6 tahun lebih dari pendidikan formal.²⁰

Selanjutnya dalam teori kultivasi tentang efek pada perubahan tingkah laku, konten pada media massa khususnya televisi diyakini memiliki pengaruh yang besar atas sikap dan perilaku penontonnya. Pengaruh tersebut tidak muncul seketika dan tidak langsung tetapi bersifat kumulatif. Hal ini yang membedakan teori ini dengan *The Hypodermic Needle Theory*²¹, atau sering juga disebut *The Magic Bullet Theory*. Dikemukakan pula bahwa pengaruh yang muncul pada diri penonton merupakan tahap lanjut setelah media itu terlebih dahulu mengubah dan membentuk keyakinan-keyakinan tertentu pada diri penonton melalui berbagai acara yang ditayangkan, yang perlu dicermati adalah bahwa teori ini lebih cenderung berbicara

¹⁸ Michael Farrand Bennet (lahir 28 November 1964) adalah seorang pengusaha, pengacara, dan politisi Amerika yang menjabat sebagai Senator senior Amerika Serikat dari Colorado sejak 2009. Seorang anggota Partai Demokrat, ia diangkat menjadi senator ketika Senator Ken Salazar menjadi Sekretaris Interior. Bennet sebelumnya bekerja sebagai direktur pelaksana Perusahaan Investasi Anschutz, kepala staf Walikota Denver John Hickenlooper, dan Kepala Sekolah Umum Denver.

¹⁹ Robert David Putnam lahir pada 9 Januari 1941, di Rochester, Dia adalah Profesor Kebijakan Publik di Peter dan Isabel Malkin Fakultas Pemerintahan Universitas Harvard, John F. Kennedy. Putnam mengembangkan teori permainan dua tingkat yang berpengaruh yang mengasumsikan perjanjian internasional hanya akan berhasil ditengahi jika mereka juga menghasilkan manfaat domestik. Karyanya yang paling terkenal (dan kontroversial), *Bowling Alone*, berpendapat bahwa Amerika Serikat telah mengalami keruntuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam kehidupan sipil, sosial, asosiasi, dan politik (modal sosial) sejak 1960-an, dengan konsekuensi negatif yang serius.

²⁰ Sumber: Kaid, Lee Lynda. 2004. *Handbook of Political Communication Research*. (University of Florida: LEA), hlm. 419.

²¹ *The Hypodermic Needle Theory* (Teori Jarum Hipodermik), juga dikenal sebagai Magic Bullet Theory (model jarum suntik hipodermis atau model sabuk transmisi) diumumkan secara resmi oleh Harold Lasswell pada tahun 1920-an. Teori "Magic Bullet" secara grafis mengasumsikan bahwa pesan media adalah peluru yang ditembakkan dari "senjata media" ke dalam "kepala" penonton.

pengaruh televisi pada tingkat komunitas atau masyarakat secara menyeluruh dan bukan pada tingkat personal atau individual.

C. Penutup

Kemanjuran komunikasi politik dipengaruhi oleh sejumlah faktor demografis, kontekstual, dan budaya, dan media memainkan peran penting dalam pembentukan dan ekspresinya. Secara umum, kemanjuran politik yang lebih besar tampaknya secara positif terkait dengan penggunaan yang lebih besar dari media urusan publik, meskipun arah sebab akibat dari hubungan ini agak tidak jelas. Ada beberapa bukti bahwa hubungan ini adalah hasil dari pengaruh intervensi pengetahuan politik, dengan penggunaan media sosial yang lebih besar mengarah pada pengetahuan yang lebih besar, yang pada gilirannya meningkatkan kemanjuran komunikasi politik.

Pengembangan nilai-nilai dan sikap-sikap dasar komunikasi politik, menghubungkannya dengan ide-ide dari setiap individu untuk dikombinasikan menjadi opini publik, dan mengekspresikan pendapat-pendapat ini melalui bentuk-bentuk perilaku politik dan kewarganegaraan yang tepat membutuhkan serangkaian keterampilan dan sumber daya. Termasuk di sini adalah keterampilan dasar seperti penalaran, argumentasi, dan komunikasi lisan dan tertulis, serta sumber daya seperti pengetahuan atau informasi tentang substansi, proses, dan orang-orang politik dan kehidupan publik. Keterampilan dan sumber daya semacam itu meningkatkan kemungkinan tidak hanya bahwa warga negara akan dilibatkan, tetapi juga bahwa mereka akan melakukannya dengan cara yang efektif yang terhubung dengan kepentingan pribadi dan perasaan mereka akan kepentingan publik. Singkatnya, warga negara yang terlibat secara demokratis adalah orang yang berpartisipasi dalam kehidupan sipil dan politik, dan yang memiliki nilai-nilai, sikap, pendapat, keterampilan, dan sumber daya secara efektif.

Seperti halnya hubungan antara kepercayaan sosial dan mengakses media sosial, dampak media sosial pada partisipasi dianggap sebagai hasil dari kombinasi kompetisi untuk waktu yang berjenjang, efek psikologis yang menghambat interaksi sosial dan konten informasi tertentu. Meskipun argumen waktu berjenjang cukup meyakinkan, argumen berdasarkan dampak psikologis dan konten informasi tertentu membutuhkan penyempurnaan dan spesifisitas yang lebih besar. Meskipun nilai Internet untuk meningkatkan keterlibatan sipil baru mulai dieksploitasi, ada bukti sugestif, jika anekdot dari potensinya. Sebagai contoh, tampak bahwa internet sangat penting bagi penyelenggaraan komunikasi politik, dia menggambarkan

fenomena umum ini sebagai pluralisme yang dipercepat, namun tidak akan mengubah logika dasar pluralisme. Warga negara akan terus berpartisipasi dalam politik dan dimobilisasi sebagian besar melalui kelompok-kelompok di mana mereka berada.

Daftar Pustaka

Curtis, Michael. 1998. *Public Opinion* Walter Lippman With New Introduction by Michael Curtis. USA and UK: Transaction Publisher

Hiplunudin, Agus. 2017. *Politik Era Digital*. Yogyakarta: Calpulis.

Kaid, Lee Lynda. 2004. *Handbook of Political Communication Research*. University of Florida: LEA.

M. Perloff, Richard. 2003. *The Dynamics of Persuasion “Communication and Attitudes in the 21 st Century”*. London: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.

Tosepu, Yusrin Ahmad. 2017. *Media Baru dalam Komunikasi Politik “Komunikasi Politik di Dunia Virtual”*. Makassar: Kavita Media.

